

Laporan Kegiatan Webinar Peluncuran Pengukuran Kinerja (Scorecard)

“Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran Covid dan Inisiatif Keterlibatan Kelompok Marginal Dalam Proses Penganggaran di Masa Pandemi”



DAFTAR ISI

Daftar Isi	II
Pendahuluan	1
Pelaksanaan Kegiatan	2
Proses Kegiatan	2
Hasil	3
Tindaklanjut Pasca Webinar	3

DAFTAR DOKUMENTASI

Dokumentasi 1. Webinar Peluncuran Pengukuran Kinerja (Scorecard)	1
Dokumentasi 2. Audiensi dengan Kemenkeu. 13 Juli 2021	3
Dokumentasi 3. Audiensi dengan BPK. 23 Juli 2021	4

Pendahuluan

Pada masa pandemik Covid-19, pemerintah di berbagai belahan dunia diharuskan untuk menerapkan kebijakan fiskal luar biasa yang secara cepat dapat merespon keadaan darurat kesehatan dan menekan potensi krisis ekonomi di masa datang. Kondisi ini telah memaksa terjadinya modifikasi pada proses anggaran supaya lebih fleksibel dan dapat dieksekusi secara cepat tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk memastikan agar pengelolaan keuangan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Open Budget Survey (OBS) yang diselenggarakan secara rutin oleh International Budget Partnership (IBP) merupakan instrumen penilaian atas kinerja tata kelola anggaran pada aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga dalam yang telah banyak dirujuk oleh banyak pemerintah di beberapa negara dunia. Dalam konteks pandemik Covid-19, IBP bekerjasama dengan Seknas FITRA telah menyusun instrumen tambahan untuk melengkapi instrumen OBS regular berupa penilaian cepat atas transparansi paket kebijakan fiskal pemerintah di masa pandemik, khususnya tahun 2020, yang kemudian disebut OBS Modul Covid. Penilaian cepat ini diantaranya ditujukan untuk mendokumentasikan berbagai aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah selama masa pandemi serta menginformasikannya kepada pemerintah dalam bentuk dialog kebijakan.

OBS Modul Covid menggunakan 26 indikator baru yang dirancang berdasarkan norma dan standar yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional, diantaranya: IMF, Intosai, GIFT, dan Open Contracting Partnership.

Kegiatan survey telah dilaksanakan di 120 negara termasuk Indonesia. Untuk melengkapi OBS Modul Covid, IBP juga melakukan penelitian yang bersifat kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan kredibilitas anggaran yang terjadi akibat pandemi COVID-19.

Sebagai mitra IBP di Indonesia, Seknas FITRA telah menyelenggarakan Webinar **Peluncuran Pengukuran Kinerja (Scorecard) “Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran Covid-19 dan Inisiatif Keterlibatan Kelompok Marginal Dalam Proses Penganggaran di Masa Pandemi”**.

Tujuan webinar ini adalah mendiseminasikan hasil penilaian cepat kinerja transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19 Indonesia tahun anggaran 2020, mendiskusikan inisiatif-inisiatif kelompok marjinal dalam memastikan akuntabilitas dan efektifitas program penanganan Covid-19, dan merumuskan rekomendasi perbaikan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19 yang responsif terhadap kelompok marjinal.

Dokumentasi 1. Webinar Peluncuran Pengukuran Kinerja (Scorecard)



Pelaksanaan Kegiatan

Webinar ini diselenggarakan pada Kamis, 3 Juni 2021, dan diikuti oleh 102 orang peserta, 59 laki-laki (58%) dan 43 perempuan (42%). Peserta terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, NGOs, Donor, dan Media. Selain yang mengikuti via zoom, kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui Fanpage Facebook Seknas FITRA dan *channel* YouTube FITRA TV.

Proses Kegiatan

Webinar ini diawali dengan sambutan dari Yuna Farhan, *Country Manager IBP Indonesia*. Yuna menjelaskan bahwa pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 di 120 negara di dunia, termasuk Indonesia, mencapai USD 14 miliar hingga akhir tahun 2020. IBP menemukan adanya kelemahan dalam transparansi dan pengawasan pada pengelolaan anggaran tersebut. Temuan umum dari laporan penilaian cepat ini antara lain:

1. Hanya $\frac{1}{4}$ negara yang mampu mempublikasikan hasil audit penganggaran dampak pandemi Covid-19 sampai akhir tahun 2020;
2. Hampir setengah negara yang menjadi objek penelitian tidak melalui prosedur persetujuan legislatif dalam proses perencanaan penganggaran Covid-19;
3. Hampir $\frac{2}{3}$ negara gagal menerapkan aspek transparansi terutama dalam prosedur pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya adalah pemaparan hasil penilaian cepat kinerja transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19 Indonesia tahun anggaran 2020 yang disampaikan oleh Misbah Hasan, Sekjen FITRA dan memo kredibilitas anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Dede Krishnadianty, Peneliti *Budget Credibility* IBP.

Dalam paparannya, Misbah menyampaikan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendapat nilai tertinggi '*Substantive/Banyak*' dan hanya empat negara yang menempati posisi '*Adequate/Cukup*', yakni Australia, Norwegia, Peru, dan Filipina. Indonesia sendiri mendapat kategori '*Some/Sedikit*' bersama 29 negara lainnya, seperti Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, dan lain-lain. Ada 55 negara masuk kategori '*Limited/Terbatas*' dan 32 negara '*Minimal*'. Sedangkan Dede menyampaikan bahwa ditemukan pola "scattered" atau terpisah-pisah dan minim dalam penyajian informasi perencanaan dan penganggaran dampak pandemi Covid-19. Selain itu, penambahan utang pemerintah jauh lebih cepat daripada penyerapan belanja PEN yang hanya mencapai 83,4 persen.

Ada empat penanggap yang hadir yakni Bapak Kunta Wibawa Nugraha, Ph.D, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan; Dika Muhammad, Sekjen SPRI; Dani Setiawan, Ketua Harian KNTI, dan Dadan Ramdan, Direktur Perkumpulan Inisiatif. Adapun Bahtiar Arif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membatalkan hadir karena berbagai sebab, padahal sebelumnya sudah menyatakan bersedia hadir. Namun berhasil FITRA menemui melalui audiensi pasca webinar.

Dalam tanggapannya, Pak Kunta menyampaikan apresiasi atas temuan-temuan OBS Covid-19 dan Memo Kredibilitas Anggaran PEN, meski hasilnya – posisi Indonesia dalam OBS tidak sesuai ekspektasi Kementerian Keuangan. Pak Kunta juga menanggapi positif hasil temuan kredibilitas anggaran PEN dan berjanji menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti FITRA dan IBP. Sedangkan Dika Muhammad, Dani Setiawan, dan Dadan Ramdan, masing-masing menyampaikan hasil audit sosial yang dilakukan di lokasi program IBP, yakni DKI Jakarta untuk isu Bantuan Sosial serta Semarang dan Medan untuk isu BBM Bersubsidi bagi nelayan kecil.

Hasil

Dengan penyelenggaraan webinar ini, hasil penilaian cepat kinerja transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19 Indonesia tahun anggaran 2020 telah terdiseminasi kepada publik, termasuk kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, Kementerian Keuangan telah menyampaikan hasil temuan OBS Covid-19 ke Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Meski agak kecewa dengan posisi Indonesia karena kalah dibanding Filipina, namun beliau menyarankan untuk melakukan perbaikan tata kelola anggaran Covid-19 agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif gender.

Tindakanlanjutan Pasca Webinar

Pasca Webinar, Seknas FITRA bersama IBP Indonesia terus mengawal rekomendasi yang telah disusun dengan melakukan audiensi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan. Audiensi dengan Kementerian Keuangan dilaksanakan pada Selasa, 13 juli 2021.

Audiensi diterima oleh Bapak Kunta Wibawa, Sudarto, dan Gusti Bustami. Sedangkan perwakilan dari Seknas FITRA dan IBP antara lain: Yuna Farhan, Donny Setiawan, Salbiyah, Dede Krishnadianty, dan Dadan Ramdan.

Hasil audiensi antara lain:

1. Kementerian Keuangan telah menyampaikan hasil OBS Covid-19 ke Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan meminta untuk melakukan perbaikan tata kelola anggaran Covid-19;
2. Kementerian Keuangan akan memperbaiki tampilan Dashboard Anggaran Covid-19 dan menyampaikan serapan anggaran PEN per pekan.

Dokumentasi 2. Audiensi dengan Kemenkeu
Selasa, 13 Juli 2021



Audiensi dengan BPK dilaksanakan pada Jum'at, 23 Juli 2021 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pihak BPK yang menemui audiensi ini antara lain: Bernadus Dwita Pradana (Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan PKN); Prof. Bambang Pamungkas (Auditor Utama Keuangan Negara); Winarno (Kepala Auditorat II A); Selvia Vivi Devianti (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional), dan Dandy Handoza (Kepala Bagian Antar Lembaga). Dari IBP, Seknas FITRA dan Koalisi Masyarakat Sipil hadir Yuna Farhan, Dede Krishnadianty, Donny Setiawan, Misbah Hasan, dan Dadan Ramdan.

Hasil dari audiensi dengan BPK antara lain:

1. BPK mengapresiasi temuan-temuan OBS Covid-19 dan Analisis Kredibilitas Anggaran PEN;
2. Peran BPK dalam pengawasan anggaran PEN telah dilakukan secara intensif namun publikasi hasil pemeriksaan anggaran PEN baru dirilis Juni 2021;
3. BPK bersedia terus bekerjasama dengan Seknas FITRA, IBP, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan sinergi pengawasan anggaran, terutama PEN.

Dokumentasi 3. Audiensi dengan BPK. 23 Juli 2021



